



Media: Seputar Indonesia

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Maret 2017

Halaman: 15

Para Difabel Tuntut Dewan Sahkan Perda Disabilitas

YOGYAKARTA - Berlatar-lairutnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kembali mengundang reaksi dari para penyandang disabilitas. Kemarin, puluhan penyandang disabilitas mendatangi DPRD Kota Yogyakarta menuntut raperda segera dibawa keparipurna untuk disahkan.

"Saat ini Kota Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah tingkat II DIY yang belum memiliki Perda Disabilitas. Padahal disisi lain, Pemkot sudah menyatakan sebagai kota inklusi," kata Koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta, Arni Suwarni.

Diutarakannya, pihaknya pada Oktober tahun lalu dijanjikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda Disabilitas bahwa raperda akan disahkan paling lambat akhir tahun. Itu setelah pihaknya menyerahkan naskah akademik (NA) baru yang sudah disesuaikan dengan UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Proses pembahasan raperda terlalu lama. Sudah berjalan sejak 2015, tapi hingga Maret

2017 belum juga disahkan. Ini sudah kali kedua kami datang langsung ke Dewan," ucapnya saat audiensi bersama pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.

Menurutnya, Perda Disabilitas sangat dinantikan karena sebagai payung hukum bagi Pemkot Yogyakarta maupun kalangan swasta yang berkeajiban memenuhi dan melindungi hak disabilitas. Dia men-

contohkan soal ketersediaan aksesibilitas umum bagi disabilitas masih kurang, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Yogyakarta Winarsih menambahkan, selain mendorong penyelesaian pembahasan Raperda Disabilitas, pihaknya juga meminta sosialisasi di-

lakukan secara menyeluruh ke masyarakat setelah perda disahkan. "Juga sanksi yang dijatuhkan karena masyarakat jarang mau membuka dan membaca perda," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Ali Fahmi yang menemui Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas mengakui hingga kini raperda masih dalam pem-

bahasan. Dia menyebut masih tersisa lima pasal yang belum dibahas. Setelah itu akan dilakukan finalisasi perda dan fasilitasi Pemd DIY untuk dievaluasi.

"Mudah-mudahan bisa cepat selesai dengan kehadiran teman-teman penyandang disabilitas. Rencana kami akan mengundang juga untuk uji publik raperda ini," katanya.

Politikus PAN itu tak memungkiri jika pelayanan bagi penyandang disabilitas seperti pendidikan dari sisi kualitas masih kurang. Diharapkan dengan adanya Perda Disabilitas, maka kualitas dan kuantitas pendidikan inklusif juga meningkat.

Sementara itu Anggota Pansus Raperda Disabilitas, Diani Anindiati menegaskan, pansus tetap berkomitmen menyelesaikan raperda. Dalam penyusunan pansus mengadopsi masukan naskah akademik dari forum penyandang disabilitas. "Kami gunakan prinsip kehati-hatian. Kami tidak ingin hak-hak disabilitas terlewat. Penyelesaian tidak sekedar mengejar selesai. Tapi memang jadi terkesan molor," ujarnya.

@ristu.hanafi

-Din. Sosial
-Bag. Hukum

Netral
Biasa
Untuk Diketahui



Para difabel menggalang dukungan dan mendatangi Gedung DPRD Kota Yogyakarta, kemarin. Mereka meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang disabilitas segera disahkan menjadi perda.

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Plt. Kepala
Sekretaris
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005